

**Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Ekowisata
(Studi di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)**

Oleh:

Auradian Marta

Abstract

This study departs from the problems in the development of the Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) in the region Indragiri Hulu Riau Province namely the destruction of ecosystems and inadequate infrastructure. This study seeks to examine the government's strategy in the development of the Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). The research method in this study using kualitatif approach. This study showed that in the development of the Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) includes planning, utilization and control is not running optimally. Synergy and cooperation between government agencies such as the Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), the Regional Government of Riau Province, Local Government Indragiri upstream has not gone well so that the development of eco-tourism area is likely to be slow.

Keywords: ecotourism, government strategy, the development

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yakni rusaknya ekosistem dan infrastruktur yang tidak memadai. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji strategi pemerintah dalam pengembangan Taman Nasional Bukit tiga Puluh (TNBT). Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pengembangan Taman Nasional Bukit tiga Puluh (TNBT) meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian belum berjalan dengan optimal. Sinergitas dan kerjasama antara instansi pemerintah seperti Balai Taman Nasional Bukit tiga Puluh (BTNBT), Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri hulu belum berjalan dengan baik sehingga pengembangan daerah ekowisata tersebut cenderung lambat.

Kata kunci: *ekowisata, strategi, pemerintah, pengembangan*

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan potensi ekowisata di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah sejak tahun 2002. Pengembangan ekowisata ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Ekowisata dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Potensi ekowisata di Indonesia sangat menjanjikan dengan berbagai daerah tujuan wisata. Salah satu objek wisata tersebut adalah Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang berada di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) secara resmi dibentuk pada tahun 1995 melalui SK. Menteri Kehutanan yang merupakan penggabungan kawasan Hutan Lindung (HL) di wilayah Provinsi Riau dan Jambi serta alih fungsi sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Riau (SK Menhut Nomor 539/Kpts-II/1995).

Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh memiliki luas lahan 144.223 hektar yang terletak dalam 2 (dua) wilayah provinsi yakni Provinsi Riau dan Provinsi Jambi dan 4 (empat) wilayah kabupaten (yaitu: Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Tebo dan Tanjung Jabung Barat). Berikut ini pembagian wilayah Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dalam beberapa wilayah:

Tabel 1
Pembagian Luas Wilayah Kawasan TNBT di Dalam Wilayah
Kabupaten di Provinsi Riau dan Jambi

| Provinsi | Kabupaten | Luas (Ha) | Proporsi (%) |
|----------|----------------------|-----------|--------------|
| Riau | Indragiri Hulu | 81.223 | 56.4 |
| | Indragiri Hilir | 30.000 | 20.8 |
| Jambi | Tebo | 23.000 | 15.9 |
| | Tanjung Jabung Barat | 10.000 | 6.9 |
| | | 144.223 | 100 |

Sumber data: RPJP TNBT 2011-2021

Pengembangan kawasan TNBT di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu menarik untuk dikaji dikarenakan lahan yang lebih luas dibandingkan daerah lain dan di wilayah kawasan tersebut terdapat suku asli yakni suku Talang Mamak. Hal ini menjadi karakteristik tersendiri dalam upaya pengembangan kawasan TNBT. Fenomena yang terjadi dalam pengembangan kawasan ekowisata Taman Nasional Bukit Tigapuluh di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yakni sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat bahkan pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan TNBT yang menghambat pembangunan karena tidak dapat dimanfaatkan sumber dayanya.
2. Intensitas perambahan hutan dan perburuan liar sering terjadi yang mengakibatkan ekosistem di Taman Nasional Bukit Tigapuluh terganggu.
3. Infrastruktur yang mendukung kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh tidak mencukupi dan tidak terpelihara dengan baik

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yangtelah dipaparkan di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah dalam pengembangan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

D. Konsep Teoritis

1. Ekowisata

Konsep ekowisata mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. *Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and improved the well being of local people* (Hadi, 2007). *Ecotourism* adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, 2004). Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab (Fandeli dan Mukhlison, 2000).

Selanjutnya Hadi (2007) menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekowisata adalah meminimalkan dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif baik kepada turis (*visitors*) maupun penerima (*host*) dan memberikan manfaat dan keberdayaan masyarakat lokal. Prinsip pengembangan ekowisata menurut *The Ecotourism Society* (Eplerwood, 1999) yakni sebagai berikut:

- a. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat.
- b. Pendidikan konservasi lingkungan
- c. Pendapatan langsung untuk kawasan

- d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
 - e. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan
 - f. Menjaga keharmonisan dengan alam
 - g. Mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat
 - h. Daya dukung lingkungan
2. Good governance

Governance menurut UNDP adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*” (“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan dibidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial, integrasi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat”). Berdasarkan defenisi ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*) yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty, dan quality of live*.
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan (Sedarmayanti, 2003: 5).

Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sector swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, provate sector menciptakan pekerjaan dan

pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk menagajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Selanjutnya *Governance* dapat diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Helifah Sj Sumarto, 2003:1-2)

Menurut OECD dan World Bank, *good governance* sinonim dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP mendefenisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*) (Sedarmayanti, 2003:6-7)

E. Motode Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk kedalam kategori deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melaksanakan wawancara dan penelusuran dokumen. Wawancara dilakukan kepada aktor yang terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yakni Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengembangan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) secara spesifik dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan bekerjasama dengan pelbagai pihak. Perencanaan pengembangan TNBT telah disusun dengan telah terdokumentasinya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tahun 2011-2021. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sebelumnya yakni Tahun 1997 – 2021 yang telah disusun oleh konsultan PT Prakarsa Indah Consultant, sesuai dengan Surat Perjanjian (SPK) No.1650/SBKSDA-I/III-I/1997 tanggal 13 Januari 1997 pada awalnya menjadi landasan pengembangan kawasan TNBT. Namun, karena masih terdapat kelemahan dan dinamika dalam pelaksanaannya maka RPJP ini direvisi.

Pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dilakukan dengan terlebih dahulu membagi kawasan tersebut kedalam beberapa wilayah resort pengelolaan seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Luas dan Panjang Batas Kawasan TNBT Berdasarkan Wilayah Resort Pengelolaan

| Seksi | Resort | Luas (Ha) | Panjang Batas (Km) |
|-------|-----------------|-----------|--------------------|
| I | Lubuk Mandarsah | 14.168 | 64 |
| | Suo-suo | 18.832 | 57 |
| | Total I | 33.000 | 121 |
| II | Lahai | 34.365 | 46 |
| | Siambul | 38.417 | 38 |
| | Talang Lakat | 12.370 | 28 |
| | Keritang | 26.071 | 35 |
| | Total II | 111.223 | 147 |
| | Total I + II | 144.223 | 368 |

Sumber data: RPJP TNBT, 2014

Pembagian kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) pada awalnya dibagi atas 5 (lima) zona 1 (satu) areal *enclave*. Zonasi TNBT sesuai dengan kriterianya telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam No: 17/Kpts/12J-V/2001. Zonasi TNBT tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Pembagian Zonasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)

| No. | Wilayah Kerja | Luas (Ha) | Keterangan |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1 | Zona Inti | 60.000 | Rencana areal enclave adalah Desa Sanglap yang berada di daam (barat daya) kawasan TNBT |
| 2 | Zona Rimba | 45.958 | |
| 3 | Zona Pemanfaatan Intensif | 2.300 | |
| 4 | Zona Pemanfaatan Tradisional | 9.690 | |
| 5 | Zona Rehabilitasi | 8.700 | |
| 6 | Areal enclave* | 1.050 | |
| | Total | 127.968* | |

Sumber data:RPJP TNBT, 2014

Keterangan:

*) Luas areal *enclave* belum disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen PHKA

**) Luas setelah temu gelang.sesuai dengan setelah di tata batas

***) SK Dirjen PKA No. 17/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 06 Februari 2001, sesuai dengan SK penunjukkan TNBT tahun 1995.

Sampai saat ini zonasi TNBT belum ditetapkan, sementara itu berdasarkan hasil analisis dan kajian lapangan diketahui penunjukkan zonasi TNBT sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Luasan penunjukkan zonasi tidak sesuai dengan luas penetapan TNBT.
2. Pembagian zona tidak sesuai dengan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No 56 tahun 2006 tentang Zonasi Taman Nasional.
3. Sebagian zona yang ada di peta penunjukkan zonasi terutama zona pemanfaatan tradisional luasan dan letaknya tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Data dari hasil survey di lapangan yang dilakukan oleh tim dari BTNBT menunjukkan perladangan berpindah yang dilakukan masyarakat di dalam kawasan sudah meluas dari zona yang peruntukannya (BTNBT 2006).

4. Jalan-jalan bekas HPH di dalam kawasan yang merupakan bagian dari zona rehabilitasi sudah tertutupi/ditumbuhi vegetasi dan bukan lagi berupa areal terbuka.

Berdasarkan hal tersebut Balai TNBT menetapkan zona indikatif kawasan sebagai berikut:

Tabel 3
Pembagian Zonasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)

| No. | Wilayah Kerja | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|-----|-------------------|-----------|----------------|
| 1 | Zona Inti | 79.601 | 55.2 |
| 2 | Zona Rimba | 51.247 | 35.5 |
| 3 | Zona Pemanfaatan | 2.643 | 1.8 |
| 4 | Zona Rehabilitasi | 1.651 | 1.1 |
| 5 | Zona Khusus | 9.081 | 6.3 |
| | Total | 144.223 | 100 |

Sumber data:RPJP TNBT, 2014

Pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) secara normatif telah tertuang dalam kebijakan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tigapuluh tahun 2011-2021 dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan TNBT diarahkan pada aktivitas yang mengarah kepada kelestarian TNBT sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar TNBT dengan didukung oleh kemantapan kelembagaan.
2. Mempertahankan kawasan TNBT dalam tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyeimbang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung.
3. Tetap terus mengupayakan langkah kreatif agar TNBT berfungsi optimal sebagai penyedia jasa lingkungan bagi para pihak dalam bentuk jasa lingkungan air, flora fauna, wisata alam, dan penyerap serta penyimpan karbon.

4. Mengupayakan kawasan TNBT memiliki dayaguna yang nyata, akan diupayakan ragam aktivitas yang memanfaatkan kawasan TNBT sebagai wahana penelitian dan pendidikan dan penerapan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan teknologi).
5. Mengimplementasikan kawasan TNBT sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui berbagai komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar kawasan TNBT menjadi *center point* pembangunan wilayah.
6. Mempertimbangkan potensi ekosistem dan kedudukan secara geografis, akan diupayakan kawasan TNBT menjadi basis (*core*) manajemen 4 DAS utama yaitu, DAS Pengabuan, DAS Batanghari, DAS Indragiri dan DAS Reteh.
7. Mengupayakan pengelolaan TNBT yang berbasiskan pengelolaan ekosistem yang sangat luas, optimalisasi pemanfaatan potensi hidrologi untuk menghasilkan hasil hutan ikutan berupa energi listrik dan pengelolaan habitat serta dinamika populasi harimau sumatera.
8. Mengembangkan pengelolaan TNBT menuju tatanan bisnis konservasi yang seluas-luasnya antara lain wisata alam, penangkaran dan budidaya, dan IPTEK.
9. Dengan pertimbangan luasnya kawasan, beragamnya potensi, dan kompleksitas problematika pengelolaan kawasan, arah pengelolaan kawasan difokuskan kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola sebagai antisipasi kendala sulitnya mendapat tambahan SDM, tidak tercukupinya sarana prasarana pengelolaan, dan sulitnya biaya manajemen.

Namun, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan TNBT ini adalah tidak semua kebijakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Survey potensi obyek wisata alam di kawasan TNBT secara menyeluruh

2. Mengusulkan secara bertahap, menjalin kerjasama dengan Pemda dan mitra kerja untuk membenahan sarana dan prasarana wisata alam
3. Mengembangkan upaya promosi melalui leaflet, booklet, poster, kalender, pameran, *website*, pusat informasi, kunjungan kesekolah dan lain-lain.
4. Mencoba mengadakan festival tradisi masyarakat talang mamak sebagai event promosi wisata
5. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan bantuan usaha ekonomi pengembangan jasa dan sarana wisata alam.
6. Pembentukan kelompok Sadar Wisata Rantau Salo
7. Meningkatkan pelayanan pengunjung bekerja sama dengan pihak lain

Khusus mengenai pelibatan dan peran serta masyarakat, Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh telah menginisiasi terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Rantau Salo Dusun Lemang Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Kelompok sadar wisata ini telah terbentuk sejak 11 Oktober 2012 namun terdapat beberapa perubahan dari susunan pengurus sehingga baru dapat diformalkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Nomor: 02/SK/RTL/IV/2013. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Sadar Wisata Rantau Salo pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tujuan jangka panjang Kelompok Sadar Wisata adalah meningkatkan kualitas masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan di bidang wisata alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat, konservasi dan penyelamatan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh”.

Oleh karena itu, untuk membantu kelompok sadar wisata tersebut Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh melakukan pembinaan dengan bentuk memberikan pelatihan. Pelatihan kepada Kelompok Sadar Wisata Rantau Salo dilakukan pada tanggal 5 s/d 8 April 2013 dan pada tanggal 16 s/d 19 September 2014. Materi pembinaan berbeda setiap tahunnya yakni pada tahun 2013

dengan materi binaan evaluasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi organisasi dan pembukuan serta interpretasi dan pemanduan. Selanjutnya materi yang disampaikan pada tahun 2014 yakni evaluasi kinerja organisasi Kelompok Sadar Wisata Rantau Salo, pembekalan kebijakan dan rencana pengembangan wisata alam TNBT dan Kabupaten Indragiri Hulu, dan praktek penataan sarana dan objek daya tarik wisata. Pelatihan bagi kelompok sadar wisata ini dilakukan secara bersama-sama oleh Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.

Bentuk kerjasama BTNBT dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu lain yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan TNBT adalah dengan melaksanakan Festival Batang Gansal yang isinya adalah berbagai atraksi budaya dan perlombaan guna mempromosikan potensi TNBT. Festival ini telah dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014. Festival Batang Gansal pada tahun 2014 ini akan diadakan pada tanggal 14-16 November 2014. Promosi potensi wisata TNBT selain dalam bentuk festival juga diperkenalkan melalui media elektronik seperti website dengan membuat paket wisata baik paket wisata untuk kawasan camp granit maupun wisata alam dan budaya di Desa Rantau Langsat.

Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Suwanto menyebutkan beberapa bentuk produk pariwisata alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu: Pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agrotourism*), pariwisata pedesaan (*village tourism*), gastronomi (*culinary tourism*), pariwisata spiritual (*spiritual tourism*) dan lainnya (Suwanto, 1997:88-89).

Pengembangan ekowisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata. Perencanaan Pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh ini dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Usaha pengembangan TNBT ini telah direncanakan dengan baik dengan dibuatnya Rencana Pengelola Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tigapuluh Tahun 2011-2021.

Perencanaan kepariwisataan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) telah memenuhi syarat-syarat dalam perencanaan kawasan pariwisata menurut Paturusi yakni sebagai berikut:

1. Logis, bisa dimengerti dan sesuai dengan kenyataan yang berlaku.
2. Luwes (fleksibel) dan tanggap mengikuti dinamika perkembangan.
3. Objektif, didasari tujuan dan sasaran yang dilandasi pertimbangan yang sistematis dan ilmiah.
4. Realitas, dapat dilaksanakan, memiliki rentang rencana: jangka panjang, menengah dan pendek.

Rencana Pengelola Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) sangat kompleks dengan menyusun kebijakan yang didasarkan terlebih dahulu melalui analisis SWOT terhadap isu-isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan TNBT. Kebijakan yang tertuang dalam RPJP tersebut juga sudah cukup memadai dengan memberikan fokus terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian dan pengawasan serta pengendalian kawasan TNBT.

Kebijakan pengembangan wilayah Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) sebagai *leading sector* dalam pengembangan kawasan yang didasarkan atas hasil analisis SWOT adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Inventarisasi Sumber Daya Alam
2. Pengukuhan kawasan
3. Penatagunaan Kawasan ke dalam Zona atau Blok
4. Perlindungan dan Pengawasan Kawasan
5. Pengawetan Keanekaragaman Hayati
6. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam
7. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan
8. Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga
9. Pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan
10. Peningkatan dan peran serta pemberdayaan masyarakat
11. Peningkatan koordinasi dan integrasi
12. Pengelolaan data base potensi kawasan
13. Pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusahaan jasa lingkungan
14. Perencanaan dan strategi pendanaan

Kelemahan pengembangan kawasan TNBT ini terletak pada koordinasi dan kerjasama yang belum berjalan dengan baik antara pihak Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (BTNBT) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola TNBT ini namun dapat berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan TNBT. Untuk itu perlu dijalin komunikasi yang intens dan sinergitas program sehingga pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dapat dilaksanakan secara berkelanjutan yang berbasiskan atas kebutuhan masyarakat. Pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dikemukakan oleh Natori menekankan yakni: 1) terpeliharanya mutu dan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya, 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,

3) terwujudnya keseimbangan antara sumber daya alam dan budaya, 4) kesejahteraan masyarakat lokal serta kepuasan wisatawan (Natori Masahito, 2001).

Saat ini pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat belum optimal dilaksanakan karena pemanfaatan terhadap potensi sumber daya alam TNBT belum dirasakan oleh masyarakat dan budaya masyarakat yang masih suka berladang berpindah menyebabkan terganggunya pelestarian alam di kawasan TNBT. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip ekowisata yang salah satunya adalah konservasi sumber daya alam.

Pengembangan yang dilakukan idealnya secara teknis dibuat dalam bentuk Tim Koordinasi Ekowisata Provinsi dan Kabupaten sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku ekowisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaku ekowisata tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang bergerak dibidang swasta. Dengan demikian perlu adanya perencanaan pariwisata daerah dalam hal ini TNBT dengan berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Perencanaan ekowisata tersebut termasuk didalamnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Selanjutnya untuk pemanfaatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) perlu mendapatkan perhatian serius yakni dikomponen pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan dan penggalan potensi baru. Pemanfaatan TNBT dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama antar pemerintah daerah yang melingkup wilayah TNBT yakni Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Kerjasama antar daerah ini dapat dilakukan dengan membuat nota kesepahaman sehingga menjadi dasar kerja pemerintah daerah.

Pengendalian Taman Nasional Bukit Tigapulu dilakukan terhadap fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian ekowisata. Pengendalian ini secara intensif dilakukan agar

pemanfaatan dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dapat terus dirasakan oleh pengunjung.

Pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dapat dilakukan oleh pihak swasta dengan memberikan modal atau investasi. Kemitraan dengan pihak swasta ini perlu dijalin dengan memberikan beberapa insentif atau kemudahan bagi investor apabila menanamkan modalnya di Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Insentif atau kemudahan tersebut dapat dilakukan dengan cara meringankan pajak dan retribusi daerah dan percepatan pemberian izin.

G. Kesimpulan

Strategi pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal. Pengembangan TNBT belum melibatkan pelbagai pihak dan masih bersifat sektoral. Sinergitas antara Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, pihak swasta dan masyarakat masih lemah dalam pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam pengembangan TNBT tidak dapat diselesaikan dengan baik.

H. Daftar Pustaka

Buku

Damanik, J. dan Weber, H.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Eplerwood, M., 1999. *Successful Ekotourism Business. The right Approach*. World Ecotourism Conference. Kota Kinibalu Sabah

Fandeli, C. dan Nurdin, M. 2005. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nugroho, I. 2004. *Ecotourism*. Malang: Universitas Widya Gama..

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.

Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah